



MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Dr. Fajar Laksono Suroso

ADOPSI GAGASAN
*CONSTITUTIONAL
JUDICIAL REVIEW* DALAM
PERUBAHAN UUD 1945

PENGENALAN GAGASAN
JUDICIAL REVIEW DALAM
PERUMUSAN UUD 1945

GAGASAN
PELEMBAGAAN MK

GAGASAN
*CONSTITUTIONAL
JUDICIAL REVIEW*

**THE MIDNIGHT
JUDGES, AS
(1803)**

**MK
AUSTRIA
(1920)**

**USULAN YAMIN
DI BPUPKI
(1945)**

**PERUBAHAN
UUD 1945
(1999-2002)**

MPR

DPR

DPA

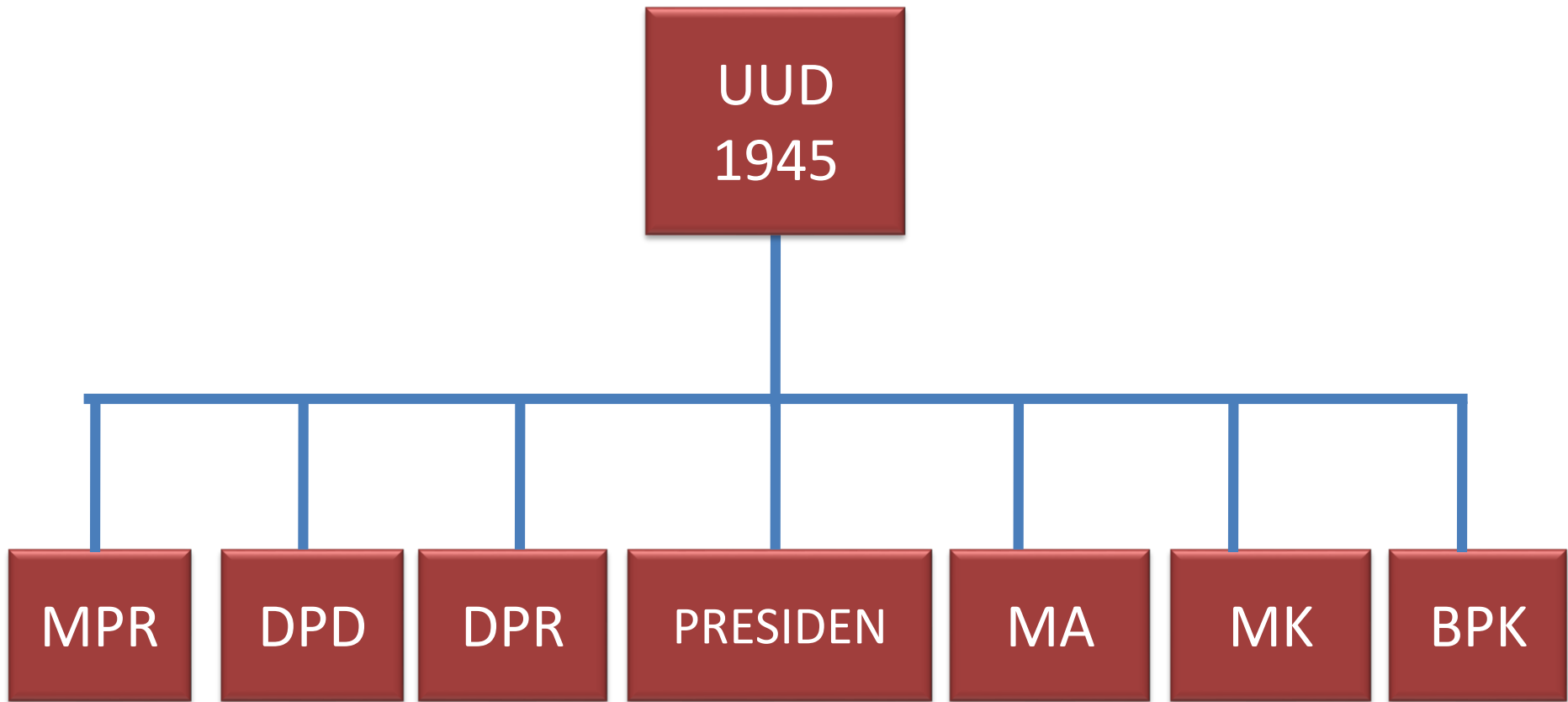
PRESIDEN

MA

BPK



KELEMBAGAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



- Peradilan pidana, perdata, TUN, dan militer
- Sengketa antar subyek hukum
- Menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- Peradilan berjenjang: Banding, Kasasi, PK
- *Judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU

- Peradilan konstitusi
- Wewenang terbatas
- Tidak menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- *Judicial review* UU terhadap UUD
- Peradilan tunggal
- Putusan bersifat final

KEWENANGAN MK

**MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD**

**MEMUTUS PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

**MENGUJI UU
TERHADAP UUD**

**MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**MEMBERI PUTUSAN ATAS DUGAAN
DPR BAHWA PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN MELANGGAR UUD**

HAKIM MK [9 orang]

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

MAHKAMAH
AGUNG

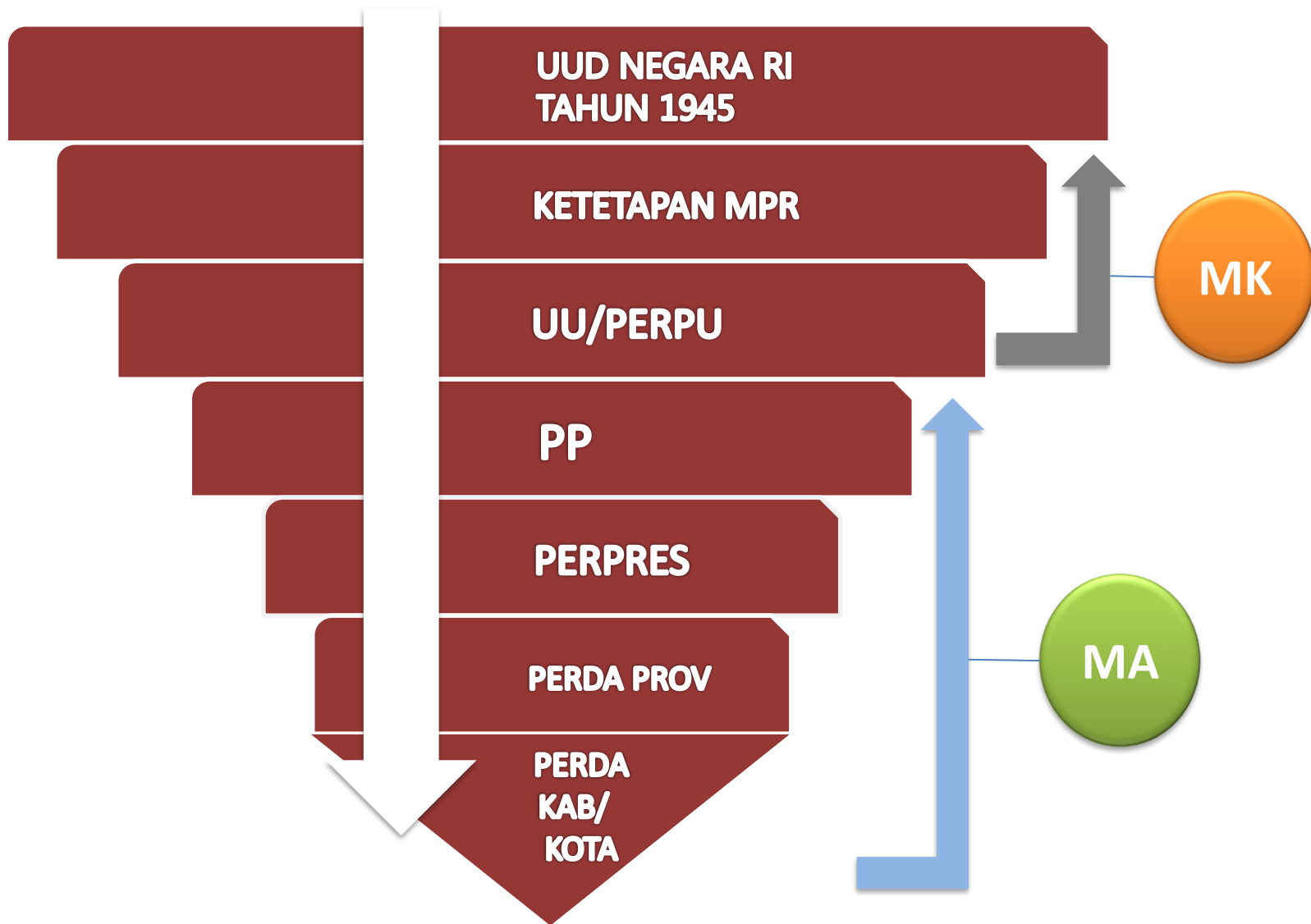


PRESIDEN



DPR





PASAL 7 UU 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	UNDANG-UNDANG	ISTILAH
1	UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
2	UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
3	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan tentang hasil pemilu
4	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
5	UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
6	UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Sengketa hasil penghitungan suara
7	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
8	UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman	Perselisihan tentang hasil pemilu
9	UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan tentang hasil pemilu
10	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Perselisihan tentang hasil pemilu
11	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perselisihan tentang hasil pemilu

JUMLAH PERKARA DIREGISTRASI (2003-2018)

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	PERSENTASE
1	Pengujian UU	1.236	46%
2	PHP Kada	982	37%
3	PHPU	414	16%
4	SKLN	25	1%
JML		2.657	100%

**JUMLAH PUTUSAN PERKARA
PUU BERDASAR AMAR**

NO	AMAR	JUMLAH PUTUSAN
1	Dikabulkan	259
2	Ditolak	420
3	Tidak Dapat Diterima	375
4	Gugur	21
5	Ditarik Kembali	115
6	MK Tidak Berwenang Memeriksa	9
JML		1.199

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK

1. INDEPENDEN DAN IMPARSIAL

2. *IUS CURIA NOVIT*

3. PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM

4. PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN TANPA BIAYA

5. *AUDI ET ALTERAM PARTEM*

6. HAKIM AKTIF DALAM PERSIDANGAN

7. *PRESUMTIO IUSTEAE CAUSA*



PERSIDANGAN

